

**LITERATURE REVIEW: EVALUASI KEBIJAKAN  
PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI INDONESIA**

**LITERATURE REVIEW: EVALUATION OF STUNTING PREVENTION  
PROGRAM POLICIES IN INDONESIA**

**Erlin Kurnia<sup>1</sup>, Hermas Pradipka<sup>2</sup>, Mahligai Aulia Prawira Negara<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Prodi Administrasi Rumah Sakit Program Sarjana STIKES RS Baptis Kediri

**Email:** [hermaspradipka@gmail.com](mailto:hermaspradipka@gmail.com)<sup>2</sup>, [mahligaiapn12@gmail.com](mailto:mahligaiapn12@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Evaluasi digunakan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dijalankan untuk mengetahui outcome dan dampak dari kebijakan yang telah ditetapkan selama dalam kurun waktu tertentu di mana yang dilihat adalah efektifitasnya. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kejadian stunting bisa terjadi dimulai dari saat janin masih dalam kandungan dan baru terlihat ketika anak berusia dua tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang evaluasi kebijakan program pencegahan stunting di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*). Sebanyak 5 (lima) jurnal Nasional dan jurnal yang dipublikasi dibatasi 10 (sepuluh) tahun terakhir. Hasil penelitian ini adalah kasus stunting terjadi erat kaitannya dengan pola makan, sedangkan pola makan juga erat kaitannya dengan masalah ekonomi, maka dari itu beberapa pemerintah di daerah-daerah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah terjadinya stunting pada anak-anak. Jurnal yang dianalisis adalah 4 jurnal evaluasi kebijakan program pencegahan stunting di Solok selatan, Pasaman Barat, Papua Selatan, Manggarai Timur belum bisa mengoptimalkan program pencegahan stunting, dan 1 jurnal dari evaluasi kebijakan program pencegahan stunting Pamanukan sudah bisa mengoptimalkan program pencegahan stunting. Kesimpulan dari program kebijakan pencegahan stunting ini masih banyak daerah di Indonesia yang belum mengoptimalkan kebijakan pencegahan stunting, maka monitoring dan evaluasi tetap diperlukan.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan, Stunting, Indonesia

**ABSTRACT**

*Evaluation is used to access the level of performance of a policy. Evaluations are carried out to determine the outcomes and impacts of policies that have been established over a certain period of time, where what is seen is their effectiveness. Health is a state of physical, mental and social well-being that enables every person to live a socially and economically productive life. Stunting events can occur starting from when the fetus is still in the womb and only become visible when the child is two years old. The aim of this research is to obtain an overview of the evaluation of stunting prevention program policies in various regions in Indonesia. This research uses a literature study method (literature review). The population is 5 (five) journals nasional and journals published are limited to the last 10 (ten) years. The results of this research are that stunting cases are closely related to diet, while diet is also closely related to economic problems, therefore several governments in Indonesian regions have implemented various policies to prevent stunting in children. 4 journals evaluating stunting prevention program optimize in Solok Selatan, Pasaman Barat, Papua Selatan, Manggarai Timur have not been able to optimize the*

*stunting prevention program, and 1 journal from the policy evaluation of the Pamanukan stunting prevention program has been able to optimize the stunting prevention program. The conclusion of research on stunting prevention policy programs is that there are still many areas in Indonesia that have not optimized stunting prevention policies, so monitoring and evaluation are needed.*

**Keywords:** Policy Evaluation, Stunting, Indonesia

## Pendahuluan

Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita stunting merupakan masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa mendatang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal (Kemenkes RI, 2018). Schmidt 2014 dalam Fikawati (2017) mengatakan bahwa stunting juga didefinisikan sebagai tinggi badan menurut usia di bawah -2 standar median kurva pertumbuhan anak WHO (WHO, 2010). Stunting merupakan kondisi kronis buruknya pertumbuhan linear seorang anak yang merupakan akumulasi dampak berbagai faktor seperti buruknya gizi dan Kesehatan sebelum dan setelah kelahiran anak tersebut. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Schmidt (2014) yang menyatakan bahwa stunting merupakan dampak dari kurang gizi yang terjadi dalam periode waktu yang lama yang pada akhirnya menyebabkan penghambatan pertumbuhan linear. Angka prevalensi stunting di tingkat nasional berdasarkan Survei Status Gizi Balita mengalami penurunan sebesar 3.27%, yaitu dari 27.67% pada tahun 2019 menjadi 24,4% di tahun 2021. Meskipun terjadi penurunan, namun stunting masih menjadi tantangan pemerintah karena target angka prevalensi stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu sebesar 14% di tahun 2024.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi.

Bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi perseorangan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi; juga bahwa upaya perbaikan gizi tersebut dilaksanakan berdasarkan pedoman yang selama ini masih tersebar dalam berbagai pedoman yang belum bersifat regulasi. Secara makro, dibutuhkan ketegasan kebijakan, strategi, regulasi, dan koordinasi lintas sektor dari pemerintahan dan semua stakeholder untuk menjamin terlaksana poin-poin penting seperti pemberdayaan masyarakat, pemberantasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pendidikan yang secara tidak langsung akan mengubah budaya buruk dan paradigma. Indikator Berat Badan Berdasarkan Umur (BB/U) merupakan Interpretasi gizi baik, gizi kurang dan gizi buruk. Indikator status gizi berdasarkan indeks BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Indikator BB/U yang rendah dapat disebabkan karena pendek (masalah gizi kronis) atau sedang menderita diare atau penyakit infeksi lain (masalah gizi akut). Dalam mengatasi masalah yang menghambat Upaya peningkatan derajat Kesehatan maka stunting yang merupakan salah satu masalah gizi yang banyak terjadi di Indonesia kita memerlukan program kebijakan public. Menurut Indiahono Dwiyanto (2009:18) kebijakan publik adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapinya.

Dengan membawa kebijakan publik ke ranah upaya pemecahan masalah publik maka warna administrasi publik akan terasa lebih kental. Pengertian di atas menekankan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik, melalui perencanaan manajemen yang baik, untuk memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi. Menurut Nugroho Riant (2003:51) kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan yang bersama yang dicita-citakan, jadi jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan) dan UUD (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan) maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh Masyarakat yang keberadaannya mengikat. Beberapa upaya untuk mengatasi masalah keterlambatan pertumbuhan dengan menggunakan berbagai strategi seperti: a) kegiatan posyandu dan pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi. Kegiatan posyandu diadakan sebulan sekali sangat ideal. Menurut hingga 75% responden, dengan mengunjungi posyandu secara rutin, perkembangan anak dilihat melalui imunisasi dasar, penambahan berat badan, tinggi badan, dan status gizi kesehatan dapat terpantau dengan baik, sehingga memudahkan penanganan kasus tersebut; b) Berikan makanan sehat seperti bubur dan biskuit dengan tambahan vitamin

untuk membantu menjaga metabolisme anak. Program Pemberian Makanan Pemulihan Tambahan untuk anak kecil dengan pertumbuhan terhambat diterapkan secara aktif; c) Membangun upaya desa KB untuk menurunkan angka stunting.

Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam tahap-tahap proses kebijakan. Sebagai kegiatan yang fungsional yaitu kegiatan yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja namun pada semua proses kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, program-program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah, implementasi, hingga dampak kebijakan, evaluasi adalah kegiatan penilaian kebijakan yang bertujuan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk melihat apakah kebijakan publik tersebut telah mencapai dampak yang diharapkan. Menurut Arikunto (2013:36) evaluasi didefinisikan sebagai berikut: "Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Menurut Anderson dalam Sulistio (2012:52), evaluasi kebijakan publik merupakan kegiatan estimasi atau penilaian yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Oleh karena itu kegiatan evaluasi adalah kegiatan fungsional yang meliputi perumusan kebijakan publik, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak dari kebijakan itu sendiri. Sebuah evaluasi kebijakan erat kaitannya dengan dampak dari suatu kebijakan pemerintah. Karena setiap kebijakan akan selalu menghasilkan dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.

Sebuah evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh kesenjangan antara “harapan” dan kenyataan. Dari berbagai pengertian evaluasi kebijakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan adalah sebuah proses penilaian atau pengukuran apakah sebuah kebijakan telah berjalan sesuai seperti apa yang telah ditentukan, baik itu dampak yang dihasilkan maupun proses pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh

gambaran tentang evaluasi kebijakan program pencegahan stunting di berbagai daerah di Indonesia.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian mengenai evaluasi kebijakan program pencegahan stunting ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*). Sebanyak 5 (lima) jurnal Nasional dan jurnal yang dipublikasi dibatasi 10 (sepuluh) tahun terakhir. Kata kunci yang digunakan adalah evaluasi kebijakan, stunting, Indonesia.

Tabel Ekstraksi dari Literature Review 5 Jurnal

Autor	Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Data Base dan Reputasi
Saltisa Beti Susanti, Sapto Pramono, Ika Devy Pramudiana	2023	Implementasi Kebijakan Program Stunting Pada Puskesmas Lawir Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur	<b>Desain:</b> kualitatif deskriptif. <b>Sampel:</b> Puskesmas Lawir, Kecamatan Lamba Leda Timur yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur. <b>Variabel :</b> Kebijakan Program Stunting <b>Analisis:</b> reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	1. Kecamatan Lamba Leda Timur belum berhasil secara optimal dikarenakan beberapa faktor, diantaranya banyak mengkonsumsi makanan instan hingga kurangnya pendidikan orang tua sehingga berdampak kepada anak. 2. Proses implementasi kebijakan program stunting berdasarkan konteks evaluasi, maka dapat dikatakan tidak ada kendala di pembentukan pos gizi di setiap desa, pemberian makanan tambahan berupa telur, susu kacang-kacangan, serta pemberian biskuit balita dan ibu hamil.	<b>Jurnal:</b> Soetomo Administrasi Publik <b>Volume:</b> 1 Nomor 3
Dian Permata Sari, Rahmadan i Yusran	2022	Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan	<b>Desain:</b> kualitatif deskriptif <b>Sampel:</b> Nagari Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu Solok Selatan <b>Variabel :</b> Kebijakan Pencegahan Stunting <b>Analisis:</b> reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	1. Pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan belum optimal dilaksanakan karena belum optimalnya pelaksanaan teknis surveilans gizi di Posyandu dikarenakan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman ibu balita mengenai pentingnya memberikan pola asuh yang baik dan benar, Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan di posyandu. 2. Keterbatasan anggaran dan tenaga kesehatan dalam pencegahan stunting Kurangnya konsistensi pemerintah dalam pencegahan, kurangnya	<b>Jurnal:</b> Journal of Civic Education <b>Volume:</b> 5 Nomor 1

				inovasi dari pemerintah daerah, kurangnya dukungan antar OPD dan lembaga terkait pencegahan stunting.	
				3. Dinas Ketahanan pangan yang hanya focus pada masalah kerawanan pangan secara umum serta sumber daya manusia kesehatan yang belum memadai serta belum merata.	
Gusmiyati, Rahmadan i Yusran	2020	Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Pasaman Barat	<p><b>Desain:</b> kualitatif deskriptif</p> <p><b>Sampel:</b> Kabupaten Pasaman Barat</p> <p><b>Variabel :</b> Kebijakan Pencegahan Stunting</p> <p><b>Analisis:</b> reduksi data, display data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan dengan penegasan.</p>	Dampak pelaksanaan kebijakan terhadap pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman Barat dapat dianalisis bahwa masih belum berdampak secara signifikan terhadap pengentasan dan pencegahan stunting.	<p><b>Jurnal :</b> Jurnal Kesehatan Andalas</p> <p><b>Volume:</b> 8 Nomor 4</p>
Heni Voni Rerey ,Masrif ,Martina Mogan, Sri Wahyuni4	2023	Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan	<p><b>Desain:</b> kualitatif deskriptif</p> <p><b>Sampel:</b> Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan</p> <p><b>Variabel :</b> Kebijakan Pencegahan Stunting</p> <p><b>Analisis:</b> Content Analysis</p>	<p>1. Hambatan terlaksananya kebijakan pencegahan stunting dari sisi input adalah SDM masih kurang dan Puskesmas yang aksesnya jauh dari Dinas Kesehatan tidak dapat melaksanakan program 1000 HPK, Belum diberikan obat-obatan kalsium dosis tinggi dan Vitamin D serta AA dan DHA.</p> <p>2. Hambatan dari komponen process adalah Kader yang memasak makanan untuk 1000 HPK (bukan petugas gizi) sehingga ditemukan masih ada sayur yang terlalu matang dalam memasak dan kurangnya penyuluhan dari Petugas Kesehatan ketika pengawasan makan di tempat di Posko 1000 HPK</p>	<p><b>Jurnal :</b> Jurnal Ilmiah Obsgin, Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan dan Kandungan</p> <p><b>Volume:</b> 15 Nomor 4</p>

---

3. Hambatan dari Komponen Output cakupan imunisasi dasar masih ada yang belum memenuhi target dikarenakan dilarang orang tua untuk imunisasi dan ketika kunjungan ulang imunisasi bayi sudah dibawa ke hutan untuk mencari makanan oleh orang tuanya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dengan membawa ibu hamil dan anak-anak.

---

## Hasil dan Penelitian

Menurut Indiahono Dwiyanto (2009:18) kebijakan publik dalam kerangka substansif adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapinya. Dengan membawa kebijakan publik ke ranah upaya pemecahan masalah publik maka warna administrasi publik akan terasa lebih kental. Pengertian di atas menekankan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik, melalui perencanaan manajemen yang baik, maka perusahaan dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai.

Menurut Riant Nugroho (2003:51) kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan, jadi jika cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan) dan UUD (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan hukum, maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Adapun beberapa tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. **Penyusunan Agenda**  
Adalah tahap-tahap kebijakan publik pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan dan menetapkan suatu kebijakan publik yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Penyusunan agenda merupakan suatu proses yang sangat baik untuk memaknai yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat.
2. **Formulasi Kebijakan**  
Pokok-pokok permasalahan yang sudah ditentukan dan diramu sedemikian rupa oleh pemerintah, kemudian dibahas secara lebih lanjut di dalam forum khusus untuk menetapkan kebijakan yang akan berlangsung di dalam negara atau daerah.
3. **Adopsi Kebijakan**  
Mempunyai tujuan secara legitimasi untuk memberikan otorisasi atau kuasa pada jalannya proses dasar pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik
4. **Implementasi Kebijakan**  
Disebut sebagai langkah penerapan sekaligus langkah uji coba yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat secara luas. Dalam tahapan ini, pemerintah melakukan perannya sebagai pengawas untuk mengawasi jalannya kebijakan publik yang berlaku di lingkungan masyarakat.
5. **Evaluasi Kebijakan**  
Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebijakan publik yang telah dilaksanakan yang menyangkut pada substansi, penerapan, dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan publik itu sendiri. Melalui tahapan inilah pemerintah dapat melakukan perbaikan terhadap kebijakan publik yang berlaku berdasarkan pengalaman yang telah dilalui selama kebijakan publik tersebut terlaksana.

Implementasi kebijakan pencegahan stunting berkaitan sampai saat ini masih menjadi permasalahan mendasar yang

dihadapi pemerintah pusat dan daerah. Diantaranya adalah rendahnya koordinasi antar OPD (Febrian dan Yusran, 2021), masih sulitnya pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting di daerah (Iqbal dan Yusran, 2021) dan dalam konteks yang berbeda yang mengungkapkan adanya relasi yang kuat dalam pergeseran kebijakan yang berdampak pada ketidakseimbangan hubungan fungsional antara kebijakan pangan, ekosistem lingkungan dan prevalensi stunting (Yusran, dkk, 2021).

Menurut beberapa penelitian, kejadian stunting pada anak merupakan suatu proses kumulatif yang terjadi sejak kehamilan, masa kanak-kanak dan sepanjang siklus kehidupan. Pada masa ini merupakan proses terjadinya stunting pada anak dan peluang peningkatan stunting terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan. Faktor gizi ibu sebelum dan selama kehamilan merupakan penyebab tidak langsung yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Ibu hamil dengan gizi kurang akan menyebabkan janin mengalami *intrauterine growth retardation* sehingga bayi akan lahir dengan kurang gizi, dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan disebabkan kurangnya asupan makanan yang memadai dan penyakit infeksi yang berulang, dan meningkatnya kebutuhan metabolisme serta mengurangi nafsu makan, sehingga meningkatnya kekurangan gizi pada anak. Keadaan ini semakin mempersulit untuk mengatasi gangguan pertumbuhan yang akhirnya berpeluang terjadinya stunting (Allen and Gillespie, 2001). Gizi buruk kronis (stunting) tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja seperti yang telah dijelaskan diatas, tetapi disebabkan oleh banyak faktor, dimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Terdapat tiga faktor utama penyebab stunting yaitu sebagai berikut: a) Asupan makanan tidak seimbang (berkaitan dengan kandungan zat gizi dalam makanan yaitu karbohidrat, protein,

lemak, mineral, vitamin, dan air). b) Riwayat berat badan lahir rendah (BBLR). c) Riwayat penyakit.

Dari hasil penelitian ditemukan beberapa kebijakan mengenai program kebijakan stunting yang ada di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Solok Selatan yaitu bayi usia kurang dari 6 bulan menerima ASI Eksklusif, ibu hamil menerima dan mengonsumsi TTD sebanyak 90 tablet pada saat kehamilan, ibu hamil yang kekurangan KEK yang menerima makanan tambahan, Balita kurus yang menerima makanan tambahan, Remaja putri (Rematri) mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD), Balita yang ditimbang berat badan (D/S), Balita usia 6 sampai 59 bulan mendapatkan kapsul vitamin A, Ibu nifas mendapatkan kapsul vitamin A, dan cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan rujukan perawatan, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku karena kurangnya konsistensi dari pemerintah daerah, kurangnya dukungan antar OPD dan lembaga terkait pencegahan stunting. Selain itu, di wilayah Pamanukan, beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien (TKPM) pada ibu hamil dan bersalin, menyelenggarakan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita, menyelenggarakan stimulus dini perkembangan anak dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal pada balita, penyuluhan untuk PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok, dan mengonsumsi narkoba, dan pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja, serta penyuluhan dan pelayanan KB, deteksi dini penyakit pada orang dewasa, dalam wilayah Pamanukan ini, program tersebut sudah dilakukan dengan optimal.

Sedangkan kebijakan program pencegahan stunting di Pasaman Barat adalah sesuai Permenkes No.23 Tahun 2014 yaitu setiap orang memiliki akses terhadap informasi gizi dan pendidikan

gizi, setiap orang terutama kelompok rawan gizi memiliki akses terhadap pangan yang bergizi, dan setiap orang memiliki akses terhadap pelayanan gizi dan kesehatan dengan tujuan memperbaiki pola makan dengan gizi seimbang, memperbaiki perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi, serta peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, namun sistem pelaksanaan di Pasaman Barat ini belum terlaksana dengan baik karena upaya perbaikan gizi belum tercapai. Kebijakan pencegahan stunting di wilayah Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Asmat adalah kegiatan Posyandu dan pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi, memberikan makanan sehat seperti bubur dan biskuit dengan tambahan vitamin untuk membantu metabolisme anak, serta membangun upaya desa KB untuk menurunkan angka stunting, namun program-program ini belum dapat terlaksana dengan baik di wilayah Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Asmat. Sedangkan beberapa program kebijakan pencegahan stunting di wilayah Manggarai Timur adalah meningkatkan pola asuh ibu terutama dalam pemberian ASI eksklusif serta pemberian makanan tambahan yang diperlukan ketika bayi berumur 6 bulan, serta melihat intervensi prenatal dan pascanatal dalam penanggulangan dan penurunan balita stunting, namun di wilayah Manggarai Timur ini, kebijakan yang telah ditetapkan belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan ibu tidak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral yang dikonsumsi ibu, tingginya angka ibu yang melahirkan di bawah usia 20 tahun, terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan di atas usia 35 tahun.

Lester dan Stewart (2000) dalam Agustino (2008), mengatakan evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kesalahan kebijakan dan untuk menentukan apakah kebijakan yang

diterapkan akan memberikan efek yang diinginkan. Menurut Lester dan Stewart (2000) membagi penilaian kebijakan menjadi empat jenis :

1. Evaluasi Proses  
Evaluasi ini berhubungan dengan tahapan pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting, dengan melihat implementasi kebijakan pencegahan stunting di beberapa daerah sudah berdampak secara signifikan atau belum terhadap masyarakat. Selain itu, juga melihat apakah masyarakat di wilayah-wilayah tersebut telah berupaya mengimplementasikan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.
2. Evaluasi Dampak  
Keberhasilan suatu kebijakan dapat diidentifikasi dari seberapa besar perubahan yang dihasilkan. Evaluasi dampak berhubungan dengan hasil dan/atau efek dari pelaksanaan kebijakan.
3. Evaluasi Kebijakan  
Evaluasi kebijakan merupakan evaluasi yang bertujuan melihat kesesuaian antara keberhasilan kebijakan dengan tujuan yang dicapai. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi Pasal 28 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (Susanti, Pramono, & Pramudiana, 2021)“Surveilans gizi ditujukan untuk melihat gambaran (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016)n tentang dampak capaian indikator kinerja pemulihan gizi nasional dan regional. Surveilans gizi adalah kegiatan analisis sistematis dan berkelanjutan tentang permasalahan gizi dan indikator pembinaan gizi masyarakat. “ (Winarno, 2014) Kemudian sesuai dengan Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2019 mengenai Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi pasal 3 yang mengatakan: “ Pelaksanaan Surveilans Gizi diselenggarakan melalui indikator masalah gizi dan kinerja program

gizi. Penyelenggaraan teknis Surveilans Gizi juga memerlukan indikator lainnya seperti Faktor Resiko yang turut memberikan pengaruh pada masalah gizi dan kinerja program gizi.”

#### 4. Meta Evaluasi

Evaluasi mengenai implementasi kebijakan untuk menentukan suatu kesamaan-kesamaan tertentu.

Menurut Suharno (2013:224-227) terdapat 3 (tiga) pendekatan besar dalam evaluasi kebijakan, yakni:

1. Evaluasi Semu Evaluasi semu (pseudo evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan.

##### a. Evaluasi Formal

Evaluasi Formal adalah pendekatan yang digunakan untuk menghimpun informasi valid dengan metode deskriptif dengan melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan tujuan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga administratif lainnya.

##### b. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi Keputusan teoritis adalah evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk mengumpulkan informasi yang valid dan akuntabel mengenai hasil kebijakan, yang dinilai secara eksplisit oleh para pelaku kebijakan.

Brigdman & Davis (dalam Badjuri dan Yuwono 2002) menjelaskan bahwa pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok, yaitu :

#### 1. Indikator Masukan

Fokus teori ini terletak pada sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumberdaya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.

#### 2. Indikator Process (proses)

##### a. Efektifitas

Indikator efektivitas terletak pada pencapaian hasil/tujuan. Apakah suatu kebijakan yang dibuat tersebut sudah tercapai. Hasil penemuan peneliti dilapangan belum semua tujuan kebijakan tercapai

##### b. Efisiensi

Efisiensi dalam proses pencegahan stunting dapat dilihat dari anggaran dan Sumber Daya Manusia

##### c. Indikator Output

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti lakukan dilapangan, bahwa program yang dijalankan oleh Dinas dan OPD terkait dalam pencegahan dan penueunan stunting perlu dilakukan secara lintas sektor. Untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya koordinasi yang dilakukan setiap OPD ada yang sudah baik.

##### d. Indikator Outcome

Pertama, untuk akses terhadap informasi gizi dan pelayanan gizi masih kurang optimal karena tenaga gizi yang tidak merata dimiliki oleh puskesmas daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Sehingga hal ini mengakibatkan pada kurangnya pemahaman masyarakat. Kedua, berdasarkan temuan peneliti yang dilakukan dilapangan akses terhadap pangan yang bergizi belum mampu memberikan dampak penurunan prevalensi stunting secara signifikan. Seharusnya dengan adanya kemudahan akses terhadap pangan yang bergizi dapat mengentaskan atau mencegah kejadian stunting.

## Kesimpulan

Kebijakan pencegahan stunting di beberapa wilayah di Indonesia adalah dengan menambah asupan makanan, vitamin, dan mineral kepada ibu hamil, ibu melahirkan, dan pada anak usia balita. Namun demikian, kebijakan yang diberikan ini belum dapat di implementasikan dengan optimal, karena beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang stunting dan masih banyaknya ibu-ibu muda yang melahirkan belum cukup umur. diperlukan evaluasi kebijakan, seperti evaluasi proses, evaluasi dampak, evaluasi kebijakan, dan meta evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini dapat diterima oleh masyarakat.

## Saran

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengimplementasian kebijakan program pencegahan stunting di Indonesia, selain membentuk kegiatan untuk menambah gizi, vitamin dan mineral pada balita, ibu hamil, dan ibu melahirkan, disarankan untuk melakukan Evaluasi kebijakan dengan interval waktu tertentu guna memantau pencapaian implementasi kebijakan tersebut dimasyarakat. Dengan demikian, dapat mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

## Daftar Pustaka

- A.G, S. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. *Yogyakarta*.
- Anggraini, Y., & Rusdy, H. (2020). Faktor Sanitasi Lingkungan Penyebab Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia*, 4(1).
- Anggreani, N. M. (2021). Evaluasi Penanganan Stunting Melalui Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Metode sistematik Review. *jurnal Ilmu Kesehatan*, 14(2):139-51.
- Arifin, Z. R. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Pencegahan Stunting di Wilayah Pamanukan (Studi kasus pada puskesmas Pamanukan). *The World Of Public Administration Jurnal*, 1(2), 11-20.
- Budi, S. I., & Ekananda, S. D. (2021). Program Inovasi Penurunan Stunting Di Puskesmas Simpang Periuk Kota Lubuklinggau. *Disertasi. Universitas Sriwijaya*.
- Budiastuti, I., & Rahfiludin, M. (2019). Faktor resiko Stunting pada anak di Negara Berkembang. *Universitas Airlangga*.
- Febrian, & Yusran. (2021). Koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting di kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 11-22.
- Gusmiyati, & Yusran, R. (2020). EVALUASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING DI PASAMAN BARAT. *Jurnal Of Policy, Governance, Development, and Empowerment*, 299-303.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Situasi Balita Pendek. *ACM SIGAPL APL Quote Quad*, 63-76.
- Ma'aruf, K., & zainal, a. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING. *Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Subang*, Vol 4,issue 1 (35-43).
- Peraturan Kementrian Kesehatan No 23. (2014). tentang Upaya Perbaikan Gizi.
- Rerey, H. F., Masrif, Morgan, M., & Wahyuni, S. (2023). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kabupaten Asmat Provinsi. *jurnal ilmiah kebidanan dan kandungan*, Vol 14 No 4 (429-

- 437).
- Sari, D. P., & Yusran, R. (2022).  
Evaluasi Kebijakan Pencegahan  
Stunting di Nagari Pulakek.  
*journal of civic education*, Vol 5  
No 1 (90-100).
- Susanti, S. B., Pramono, S., &  
Pramudiana, I. D. (2021).  
Implementasi Kebijakan  
Program Stunting Pada  
Puskesmas Lawir. Vol 1. No 3  
(571-581).
- Winarno, B. (2014). Kebijakan Public,  
Teori, Proses Dan Studi Kasus.  
*Yogyakarta : CAPS*.